



Efisiensi Administrasi Dalam Perencanaan Tata Ruang Terkait Penyesuaian Beban Administrasi Dengan Mandat Dinas Penataan Ruang

Muhammad Syafri Qodri¹, Bintang Naharika Citra Melati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 07 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 23 Juni 2024

Dinas Penataan Ruang memiliki tugas pokok, serta fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang berkaitan dengan penyesuaian atau perubahan kebijakan terkait tata ruang, agraria, atau kebijakan pertanahan nasional di Indonesia. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan dinamika perubahan yang terus menerus terkadang sejalan dengan semakin besarnya beban pembangunan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, yang tentunya berdampak pada kebutuhan belanja pemerintah yang lebih besar. Dalam hal ini Dinas Penataan Ruang melaksanakan yang menjadi urusan pemerintahan di daerah atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan pada bidang pekerjaan umum, yaitu perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis. Dinas Penataan Ruang mengawasi dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Keywords: *Efisiensi Administrasi, Perencanaan Tata Ruang, Beban Administrasi*

(*) Corresponding Author: mhmmmsyafri@gmail.com, naharikabintang123@gmail.com

How to Cite: Qodri, M., & Melati, B. (2024). Efisiensi Administrasi Dalam Perencanaan Tata Ruang Terkait Penyesuaian Beban Administrasi Dengan Mandat Dinas Penataan Ruang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 478-486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754804>

PENDAHULUAN

Dinas Penataan Ruang memiliki tugas pokok, serta fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022. Dalam hal ini Dinas Penataan Ruang melaksanakan yang menjadi urusan pemerintahan di daerah atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan pada bidang pekerjaan umum, yaitu perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis.

Teknologi informasi merupakan bentuk dari pelayanan prima yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama mengenai efektivitas pada pemberian pelayanan di kantor pelayanan pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi PBG dengan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Pemerintah memiliki hak dan kewenangan tugas untuk memberikan pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development). Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yaitu mengenai pelayanan publik. Pelayanan yang baik menjadikan sebuah ciri Good Governance pada kemampuan pemerintah yang dapat menjalankan pelayanan sesuai fungsi negara yang baik. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah merupakan keharusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh 7 pemerintah daerah baik ataupun berkualitas, memperlihatkan

pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil karena pemerintah daerah dapat melaksanakan tanggung jawab, hak serta kewenangannya dalam mengurus urusan di daerahnya.

Perencanaan tata ruang merupakan suatu aspek krusial dalam pembangunan suatu wilayah, memastikan bahwa penggunaan lahan dan sumber daya alam terjadi secara teratur dan berkelanjutan. Keberhasilan perencanaan tata ruang tidak hanya tergantung pada aspek teknis dan desain, tetapi juga sangat terkait dengan efisiensi administrasi yang mengawal dan mengelola pelaksanaannya. Dalam kerangka ini, penelitian ini mendalami tentang "Efisiensi Administrasi dalam Perencanaan Tata Ruang terkait Penyesuaian Beban Administrasi dengan Mandat Dinas Penataan Ruang."

Ketika berbicara tentang perencanaan tata ruang, tidak dapat dipungkiri bahwa administrasi memiliki peran yang sangat penting. Administrasi yang efisien memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berjalan lancar, meminimalkan hambatan serta menyesuaikan beban administrasi dengan mandat Dinas Penataan Ruang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dalam konteks perencanaan tata ruang, khususnya terkait dengan penyesuaian beban administrasi sesuai dengan mandat Dinas Penataan Ruang. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah merupakan tanda kemajuan suatu bangsa. Namun, perkembangan ini seringkali tidak terkontrol, mengarah pada peningkatan kerawanan lingkungan, perubahan iklim, dan konflik sumber daya. Inilah sebabnya mengapa perencanaan tata ruang menjadi semakin krusial dalam memastikan bahwa pertumbuhan wilayah terjadi dengan seimbang dan berkelanjutan. Namun, selaras dengan kompleksitas tugas ini, sering kali administrasi perencanaan tata ruang menghadapi tantangan yang signifikan.

Terkadang, beban administrasi dalam konteks perencanaan tata ruang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan mandat Dinas Penataan Ruang. Oleh karena itu, penyesuaian beban administrasi menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa setiap langkah administratif mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan tata ruang. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi proses administrasi saat ini dan menentukan strategi penyesuaian yang tepat agar mandat dinas dapat terlaksana optimal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang efisiensi administrasi dalam konteks perencanaan tata ruang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merinci strategi dan rekomendasi penyesuaian beban administrasi agar sesuai dengan mandat Dinas Penataan Ruang.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan wawasan yang bermakna bagi para praktisi dan pengambil keputusan di bidang perencanaan tata ruang, serta untuk menyumbangkan pemikiran baru dalam literatur akademis yang berkaitan dengan administrasi dan efisiensi dalam konteks pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengejar pemahaman lebih dalam tentang efisiensi administrasi dalam perencanaan tata ruang, tetapi juga menganalisis bagaimana penyesuaian beban administrasi dapat dilakukan agar sesuai dengan mandat Dinas Penataan Ruang. Rasio penelitian ini didorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi pada pemikiran teoritis dan praktis di bidang perencanaan tata ruang, yang menjadi kunci dalam pembangunan

berkelanjutan. Sebagai suatu bidang yang terus berkembang, perencanaan tata ruang membutuhkan pendekatan yang holistik. Dengan menggali lebih dalam efisiensi administrasi dan penyesuaian beban administrasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru, memunculkan inovasi, dan memberikan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penataan Ruang.

Rumusan Masalah

1. Apa saja aspek-aspek administrasi yang memerlukan penyesuaian beban terkait dengan mandat Dinas Penataan Ruang Kota Semarang?
2. Apa solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efisiensi administrasi dalam pelaksanaan mandat Dinas Penataan Ruang?

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015), metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (what)”, “bagaimana (how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena. Dalam pendekatan kualitatif, adanya seorang informan yang memberikan informasi dan data yang diperlukan. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh diolah dan dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan penelitian terfokus pada tema dan judul yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja aspek-aspek administrasi yang memerlukan penyesuaian beban terkait dengan mandat Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang di Dinas Penataan Ruang, proses tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang berkaitan dengan penyesuaian atau perubahan kebijakan terkait tata ruang, agraria, atau kebijakan pertanahan nasional di Indonesia. Lalu dalam pelaksanaan penyusunan tata ruang, terdapat minimal 2x konsultasi publik sebelum rancangan penyusunan tata ruang diundangkan berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada dan harus disetujui oleh provinsi serta mendapatkan rekomendasi dari lintas sector kementerian masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain, proses perencanaan tata ruang tersebut biasanya memakan waktu hingga beberapa tahun lamanya. Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang memakan waktu 3 tahun lebih dalam rangka Menyusun Perencanaan Tata Ruang.

Dinas Penataan Ruang mengawasi dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 yang mengacu pada wilayah yang diawasi dan dikendalikan. Sebagai contoh, Kota Semarang terdiri atas 117 kelurahan, 16 Kecamatan, dan 373,8 km² luas kota Semarang. Dinas

Penataan Ruang Kota Semarang mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan kota Semarang bukanlah hal yang mudah mengacu pada luas kota Semarang yang bisa dikatakan cukup luas dan besar untuk perkotaan sehingga Dinas Penataan Ruang membutuhkan bantuan berupa Kerjasama bersama instansi pemerintah lainnya yang saling berkaitan, dan juga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundangan tentang tata ruang bahwa masyarakat diperbolehkan untuk ikut mengawasi secara kedinasan yang dimana dalam hal ini dibantu oleh Lurah dan Camat Wilayah yang akan memberikan informasi kepada Dinas Penataan Ruang jika terdapat proses pembangunan di wilayahnya berkaitan dengan bagaimana pengendaliannya berdasarkan izin pemanfaatan ruang atau perencanaan kota, melalui perencanaan kota dengan pertimbangan apakah terdapat sistematika yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang ataupun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penataan Ruang yang mempunyai perizinan mutlak.

Lalu berkaitan dengan data dan informasi terkait tata ruang yang dikelola di Dinas Penataan Ruang dan jenis data yang dikumpulkan serta bagaimana data tersebut disimpan bahwa Dinas Penataan Ruang memiliki macam-macam peta untuk data dan informasi terkait tata ruang yang berbentuk fisik dan digital yang dimulai dari tahun 1975. Lalu untuk perizinan sejak tahun 2015 hingga 2018 disimpan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang disimpan secara digital. Dinas Penataan Ruang mengedepankan transparansi data penataan ruang kepada masyarakat dan pihak terkait dalam bentuk konsultasi publik ataupun pertemuan dengan *stakeholder* selama 2x sebelum draft diundangkan dan dilakukan untuk menampung masukan masyarakat terkait perencanaan tata ruang.

Proses pemberian izin terkait tata ruang di Dinas Penataan ruang sudah tercantum secara jelas dan lengkap dalam website resmi Dinas Penataan Ruang kota Semarang. Dinas Penataan Ruang mempunyai upaya edukasidan penyuluhan terkait penataan ruang yang dilakukan yakni dengan melakukan FGD dan sosialisasi terkait tata ruang dengan sasaran investor yang mengatur perumahan untuk industriawan. Dalam pelaksanaan FGD dan Sosialisasi, Dinas Penataan Ruang berinisiatif untuk mengundang para tokoh masyarakat di masing-masing wilayah dengan tujuan menaikkan investasi sehubungan dengan kota Semarang yang sedang gencar-gencarnya memajukan penataan ruang sehingga banyak investasi yang masuk di kota Semarang dan kota Semarang dinilai berkembang oleh para Investor. Sehubungan dengan stigma investor bahwa Semarang merupakan kota yang berkembang, Bank Indonesia membuat buku terkait kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan diatas pertumbuhan ekonomi negara dan banyaknya infrastruktur yang masuk sehingga dipandang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang menjadikan kota Semarang menarik bagi investor. Dinas Penataan Ruang kota Semarang melakukan pemantauan dan melaporkan progres implementasi rencana tata ruang dengan membuat laporan ke gubernur dan pemerintah pusat minimal 1x tiap tahun dengan tujuan perwujudan pola ruang dan perwujudan struktur ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang sesuai dengan indikasi program dimana hal tersebut harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Terdapat kegiatan penelitian dan analisis yang dilakukan terkait tata ruang di Dinas Penataan Ruang kota Semarang yakni dengan analisis daya dukung dan daya tampung, serta kepadatan tampung yang memiliki acuan dari analisis yang diambil

dalam kurun waktu 5-10 tahun kebelakang dalam bentuk survei primer dan sekunder. Lalu Dinas Penataan Ruang kota Semarang dalam melaksanakan koordinasi mempunyai kegiatan rutin yakni dengan forum koordinasi dan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh team teknis yang sesuai dengan peraturan Menteri Agraria bahwa dalam rangka Menyusun tata ruang harus dibentuk team teknis penyusun tata ruang yang anggotanya terdiri dari beberapa dinas ataupun OPD yang ada di kota Semarang. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang telah mencapai pencapaian mereka dalam memastikan keberlangsungan dan keandalan infrastruktur sistem informasi terkait tata ruang, belakangan ini Dinas Penataan Ruang telah memenangkan Mandala award atas *One Click* Investasi yang diterapkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Sebelum Dinas Penataan Ruang kota Semarang melaksanakan *One Click* investasi, banyak stigma yang dikeluarkan oleh masyarakat bahwa tata ruang merupakan penghambat investor yang masuk di Indonesia. Dengan adanya sistem *One Click* investasi yang transparan sehingga masyarakat bisa langsung melihat data *One Click* investasi di website resmi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang stigma masyarakat tersebut telah terpecahkan dengan adanya kecerdasan buatan/AI yang dikembangkan dalam sistem yang mampu menjawab apakah di suatu lokasi dengan kondisi yang ada bisa mendirikan bangunan dengan mempertimbangkan perekonomian di daerah yang ingin dibangun bangunan tersebut.

Pelaksanaan sistem informasi manajemen bangunan gedung tercantum dalam website resmi Dinas Penataan Ruang kota Semarang pada SIMBG yang dimiliki Kementerian PUPR melalui menu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya Bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). PBG dan IMB memiliki perbedaan yang cukup signifikan, pemenuhan persyaratan IMB tidak mempertimbangkan sumbu resapan dari dibangunnya suatu gedung (kondisi wilayah, alur pembuangan limbah domestic, dan pertimbangan pembuangan limbah gedung lainnya). Sedangkan PBG mengedepankan pemenuhan persyaratan teknis dan melalui sistem dengan merencanakan gancang bangunan melalui orang yang mempunyai sertifikat keahlian yang dalam hal ini merupakan arsitek, serta Dinas Penataan ruang bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan karna perlu dilaksanakan dan diawasi oleh orang yang mempunyai pemahaman terkait pembangunan.

PBG baru terlaksana di Indonesia pada masa transisi pandemi COVID-19 ke kondisi *new normal* pada tahun 2021, sehingga pada tahun tersebut Dinas Penataan Ruang kota Semarang masih mempelajari sistematis pelaksanaan PBG dengan melakukan konsultasi ke PUPR dan melakukan studi banding, diskusi dengan Dinas Penataan Ruang Kabupaten Semarang dan Dinas Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, mengadakan workshop yang menghadirkan narasumber dari PUPR Kota Semarang tentang bagaimana alur proses pendaftaran, memverifikasi pengajuan, dan penerbitan persetujuan yang Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Sistematis Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Semarang, kota-kota di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta tentu berbeda karena dari segi bentuk bangunan yang dimohon untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dan terbagi dalam tingkatan sederhana, menengah, dan tinggi

yang berpengaruh dalam mekanisme pengajuan hingga bangunan selesai dibuat (dalam hal ini Dinas Penataan Ruang mempertimbangkan dengan meminimalisir resiko terhadap lingkungan yang akan dibangun gedung). Dalam pelaksanaannya, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mempunyai tantangan dan masalah tersendiri dalam pelaksanaan PBG yakni SIMBG yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak bisa mengakomodir semua titik di kota Semarang dalam perolehan database untuk capaian dalam sisi retribusi sebagai tolak ukur capaian.

2. Apa solusi atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efisiensi administrasi dalam pelaksanaan mandat Dinas Penataan Ruang

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan dinamika perubahan yang terus menerus terkadang sejalan dengan semakin besarnya beban pembangunan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik, yang tentunya berdampak pada kebutuhan belanja pemerintah yang lebih besar. Kesulitan yang dihadapi semakin besar karena terbatasnya potensi sumber daya di wilayah seperti Kota Semarang. Di sisi lain, seruan terhadap penerapan good governance semakin meningkat seiring dengan proses globalisasi dan demokrasi, serta semakin berkembangnya wawasan politik dan pengetahuan masyarakat.

Untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik secara efektif, seseorang harus bertanggung jawab untuk menciptakan dan menerapkan sistem yang akurat, transparan, dapat diukur, dan sah. Hal ini akan memungkinkan tata kelola dan pembangunan berjalan secara efisien, berhasil mencapai manfaat, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah yang menjadi bagian penyelenggaraan pemerintahan negara harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Ia juga mempunyai wewenang untuk mengelola sumber daya sesuai dengan strategi perencanaan yang diputuskan oleh masing-masing lembaga.

Karena letak geografisnya yang berada di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai peranan penting dan esensial dalam percaturan internasional. Kepentingan politik, ekonomi, militer, dan keamanan—khususnya perdagangan global—semuanya menunjukkan perilaku seperti ini. Kemakmuran akan dirasakan seluruh rakyat Indonesia jika dikelola dengan baik dan efisien. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi di atas berpotensi menimbulkan sejumlah kerentanan yang membahayakan ketahanan negara. Menurunnya ketahanan nasional dan pembangunan ekonomi diakibatkan oleh penataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyaknya daerah yang masuk dalam daerah miskin membuat penyusunan RTRW di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi penting. Daerah tertinggal pada dasarnya adalah daerah yang belum banyak mengalami kemajuan baik dari segi kondisi fisik, sosial, maupun ekonominya. Diharapkan dengan disusunnya RTRW akan dapat menghindari penggunaan lahan yang bukan peruntukannya. Pembangunan ekonomi akan terhambat oleh cepatnya pengalihan lahan pertanian yang menguntungkan ke properti non-pertanian yang digunakan untuk perumahan, bisnis, dan industri.

Saat ini, masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas, serta meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap birokrasi yang melindungi dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Republik Indonesia tentang Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang mampu membina dan meneguhkan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi. hukum, dan penerimaan masyarakat dianggap sebagai praktik tata kelola yang baik. Salah satu prinsip dasar tata pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam kepatuhan terhadap standar-standar ini adalah penyediaan layanan istimewa yang dapat didukung oleh masyarakat secara keseluruhan, dengan tugas bawaan pemerintah untuk menjamin kualitas layanan publik. Kualitas layanan yang luar biasa merupakan komponen efektivitas yang penting. sebuah organisasi yang biasanya ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk keuangan, sumber daya manusia, sistem, dan institusi.

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (DISTARU) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan tata kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, menyelenggarakan pelayanan publik jenis ini. Oleh karena itu, dengan mengembangkan pelayanan yang efektif, sederhana, dan terpadu, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (DISTARU) telah mencapai terobosan pelayanan. Layanan One Click Investment yang memberikan kemudahan bagi investor dalam memperlancar proses investasi bagi calon investor yang akan berinvestasi di Kota Semarang merupakan salah satu contoh karya inovatif yang dilakukan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (DISTARU).

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memulai dengan menghilangkan stigma terkait “penataan ruang menghambat investasi” dengan memperkenalkan opsi investasi one klik yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menentukan lokasi secara akurat. Pemerintah Kota Semarang meraih penghargaan di Bhumandala Awards berkat pemanfaatan data geospasial yang ekstensif. “Aplikasi ini juga memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada calon investor tentang boleh atau tidaknya suatu jenis investasi tanpa harus datang ke kantor layanan,” tambah Irwansyah.

Hendi dalam keterangan terpisah mengatakan, penghargaan yang diterimanya merupakan representasi fisik dari gagasan Bergerak Bersama yang menjadi pedoman pertumbuhan Kota Semarang. “Saya bersyukur atas pencapaian ini. Semua pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Kota Semarang, berkolaborasi untuk mencapai hasil yang luar biasa ini. Sejalan dengan semangat Pak Jokowi untuk mewujudkan percepatan pembangunan, saya ingin prestasi ini menjadi motivasi bagi teman-teman birokrasi Pemkot Semarang untuk terus berinovasi, ujarnya. Dinas Tata Ruang Kota (Distaru) Kota Semarang menawarkan aplikasi yang sangat sederhana melalui websitenya, setelah itu mengajukan permohonan, masyarakat dapat menemukan panduan penggunaan AI di menu investasi sekali klik. Pedoman ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya calon investor.

KESIMPULAN

Dalam hal ini Dinas Penataan Ruang melaksanakan yang menjadi urusan pemerintahan di daerah atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan pada bidang pekerjaan umum, yaitu perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis. Teknologi informasi merupakan bentuk dari pelayanan prima yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat terutama mengenai efektivitas pada pemberian pelayanan di kantor pelayanan pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi PBG dengan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Perencanaan tata ruang merupakan suatu aspek krusial dalam pembangunan suatu wilayah, memastikan bahwa penggunaan lahan dan sumber daya alam terjadi secara teratur dan berkelanjutan. Keberhasilan perencanaan tata ruang tidak hanya tergantung pada aspek teknis dan desain, tetapi juga sangat terkait dengan efisiensi administrasi yang mengawal dan mengelola pelaksanaannya. Ketika berbicara tentang perencanaan tata ruang, tidak dapat dipungkiri bahwa administrasi memiliki peran yang sangat penting. Administrasi yang efisien memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berjalan lancar, meminimalkan hambatan serta menyesuaikan beban administrasi dengan mandat Dinas Penataan Ruang.

Dinas Penataan Ruang mengawasi dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 yang mengacu pada wilayah yang diawasi dan dikendalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo P, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan' [2014] *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 401
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Indrajit RE, *Electronic Government : Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Andi Offset 2002)
- Mandasari Z, 'AAUPB Dan Dinamika Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung' (2023) 2 *JAPHTN-HAN* 81
- Maranjaya AK, 'Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan' (2022) 2 *Jurnal Sosial Teknologi* 929
- Margaretha, E. (2021). *Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara* (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Permatasari A, 'Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas' (2020) 2 *DECISION: Jurnal Administrasi Publik* 51
<<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/decision/article/view/2382>>
- Suhermawaty, A. O. (2023). *Efektivitas Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
- Tim Jateng Report, 'Inovasi Sistem Informasi Geospasial Kota Semarang Raih Penghargaan Dalam Asia Pasific Geospatial Forum' *Jatengreport.com* (Semarang, 2023) <<https://jatengreport.com/bacaberita/3830/inovasi-sistem-informasi-geospasial-kota-semarang-raih-penghargaan-dalam-asia-pasific-geospatial-forum>>

Ulenalung VY, 'Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007' (2019) 7 *Lex Administratum*